

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi berupa dokumen atau ringkasan tertulis yang menggambarkan kinerja keuangan suatu entitas bisnis atau organisasi selama periode waktu tertentu. Menurut Munawir (2002), laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk mengumpulkan informasi mengenai posisi keuangan dan hasil perusahaan yang bersangkutan, sehingga laporan keuangan dianggap dapat membantu pemakai (*users*) membuat keputusan ekonomi yang berhubungan dengan keuangan.

Laporan keuangan terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan bermanfaat untuk menyediakan informasi posisi keuangan yang akurat, kinerja, perubahan posisi keuangan terhadap perusahaan, badan dan instansi pada periode tertentu, dan membantu manajemen dalam mengambil keputusan oleh siapapun yang membutuhkan laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu (Fitriani, 2017).

Pemerintah merupakan suatu organisasi yang diberi kekuasaan untuk mengatur kepentingan bangsa dan negara. Setiap lembaga atau instansi pemerintah dibentuk sebagai organisasi yang mempunyai tujuan bukan untuk mencari keuntungan tetapi menyediakan pelayanan sesuai dengan fungsinya bagi masyarakat

dan meningkatkan layanan tersebut dimasa yang akan datang. Sebagian besar sumber dana yang diperoleh pemerintah berasal dari pajak, donasi atau sumbangan, utang, laba perusahaan negara atau daerah, sumber lainnya. Pemerintah sebagai manajemen yang mengelola keuangan negara memiliki tugas khusus dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber-sumber dana tersebut kepada masyarakat selaku pembayar pajak, donatur, kreditur, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan (Oman Rusmana, 2017).

Pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap warganya dan pemangku kepentingan lainnya untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan tentang bagaimana dana publik digunakan. Laporan keuangan pemerintahan adalah sarana penting untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas ini. Masyarakat memerlukan pemahaman tentang bagaimana dana publik dikelola dan mengapa kebijakan keuangan tertentu diambil. Laporan keuangan pemerintahan bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang situasi keuangan dan kinerja pemerintahan. Pemangku kepentingan, seperti parlemen, badan pengawas, investor, dan masyarakat, memerlukan informasi ini untuk mengambil keputusan yang tepat. Penyajian laporan keuangan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tercipta laporan keuangan yang baik dan memenuhi standar yang berlaku. Laporan keuangan yang dilaporkan setiap lembaga atau instansi pemerintah akan memperlihatkan gambaran kondisi keuangan lembaga tersebut.

Setiap pemerintahan provinsi/kota/daerah, dinas dan instansi beserta seluruh badan, termasuk Badan Pusat Statistik memiliki kewajiban untuk membuat, menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan yang harus sesuai

dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai standar pedoman. Standar Akuntansi Pemerintahan yang diterapkan oleh BPS dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangannya didasarkan pada prinsip akuntansi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Mekanisme penyusunan dan penyajian laporan keuangan pada BPS umumnya melakukan pencatatan setiap transaksi keuangan yang terjadi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku. Hal ini mencakup pendataan, penerimaan, pengeluaran, serta aset dan kewajiban lainnya. Data ini diukur dan disusun dalam bentuk laporan keuangan yang memuat informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas. Laporan keuangan ini harus mematuhi Standar Akuntansi Pemerintahan yang mengatur format, isi, dan penyajian informasi. Laporan ini harus mencakup semua komponen yang diperlukan, seperti neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Mekanisme penyusunan dan penyajian laporan keuangan ini merupakan bagian penting dalam menjaga integritas dan kualitas statistik yang dihasilkan oleh BPS serta dalam memenuhi kewajiban akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan dana publik. Laporan keuangan yang akurat dan relevan membantu memastikan bahwa BPS dapat menjalankan kegiatannya dengan efisien dan efektif, dan memberikan informasi yang jelas kepada pemangku kepentingan mengenai penggunaan dana publik (Fitriani, 2017).

Berdasarkan pada uraian yang sudah dijelaskan diatas. Hal tersebut menjadi alasan bagi penulis untuk membahas dan mengetahui lebih lanjut mengenai mekanisme penyusunan dan penyajian laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat dengan judul: **“MEKANISME PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP) PADA BADAN PUSAT STATISTIK (BPS) PROVINSI SUMATERA BARAT“**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana langkah-langkah penyusunan dan penyajian laporan keuangan pada Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat?
2. Komponen dan pos-pos apa saja yang terdapat dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pada aplikasi yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat?
3. Apakah penyusunan dan penyajian laporan keuangan pada Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penulisan dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui langkah-langkah penyusunan dan penyajian laporan keuangan pada Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui komponen dan pos-pos yang terdapat dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pada aplikasi yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat.
3. Untuk mengetahui apakah penyusunan dan penyajian laporan keuangan pada Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1.4 Manfaat Penulisan

1. Bagi Penulis

Manfaat yang penulis dapatkan yaitu :

- a. Sebagai sarana penerapan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan ke dalam kehidupan kerja nyata.
- b. Menambah gambaran, wawasan, serta pengetahuan yang jelas mengenai bagaimana mekanisme penyusunan serta penyajian laporan keuangan suatu instansi yang baik dan benar dari kegiatan magang selama 40 hari kerja.
- c. Dapat mengetahui secara langsung bagaimana mekanisme penyusunan serta penyajian laporan keuangan berdasarkan SAP pada BPS Provinsi Sumatera Barat.

2. Bagi Instansi

Manfaat yang instansi dapatkan yaitu :

- a. Sebagai sarana dalam pemberian saran serta masukan sehingga dapat membuat kinerja instansi tempat magang menjadi lebih baik dari sebelumnya.
- b. Menciptakan kerjasama yang baik antara instansi tempat magang dengan pihak Universitas khususnya bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
- c. Berpartisipasi dalam mendukung program pemerintah dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan ahli pada bidangnya.

3. Bagi Pembaca dan Pihak Lain

Manfaat yang pembaca dan pihak lain dapatkan yaitu :

- a. Menambah informasi, pengetahuan, wawasan serta bahan pembelajaran mengenai mekanisme penyusunan serta penyajian laporan keuangan berdasarkan SAP pada instansi pemerintahan BPS Provinsi Sumatera Barat.
- b. Dapat menjadi sumber referensi bagi para pembaca dan pihak lain yang membutuhkan.

1.5 Tempat dan Waktu Magang

Kegiatan magang ini dilaksanakan di BPS (Badan Pusat Statistik) Provinsi Sumatera Barat, yang beralamat di Jl. Khatib Sulaiman No. 48 Padang, Sumatera Barat dengan waktu pelaksanaan magang dimulai dari bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Maret 2024 dan berlangsung selama 40 hari kerja.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas terkait dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, tempat dan waktu magang serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini membahas terkait dengan landasan teori berupa pengertian laporan keuangan, tujuan laporan keuangan, entitas akuntansi dan pelaporan, jenis-jenis laporan keuangan, serta karakteristik kualitatif laporan keuangan, pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), basis penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), tujuan dan peranan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), ruang lingkup Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini membahas terkait dengan gambaran umum instansi serta sejarah berdirinya BPS, visi misi BPS, rencana kerja tahunan serta kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangan, serta struktur organisasi pada Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini membahas terkait dengan deskripsi tentang pembahasan mekanisme penyusunan dan penyajian laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat.

BAB V : PENUTUP

Bab ini membahas terkait dengan kesimpulan dari permasalahan yang sudah dibahas serta saran-saran bagi instansi yang bersifat membangun mengenai mekanisme penyusunan dan penyajian laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat.

